

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natale-

⁵ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁶ Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁴⁴ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁶ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 01/08/2018

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁷

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijckheid;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik

⁷ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh:

pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)

4. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.

6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

B. Tinjauan Umum Pornografi

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang pornografi ini. Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani porne dan graphien. Porne berarti pelacur dan graphien berarti ungkapan.⁹ Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

Pada dasarnya pornografi terbatas pada tulisan atau gambar gambar wanita nakal atau mesum yang membangkitkan birahi laki-laki. Pornografi juga dapat menggunakan berbagai media teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal, film porno yang menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang di ucapkan dan atau suara-suara erotik lainnya¹⁰, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis, novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi dan suatu pertunjukan hidup pun dapat di sebut porno.

Pornografi dapat menggunakan berbagai media, teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernafas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang di ucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara menjajah seringkali

⁹ Abu Abdurrahman Nusantara, 2018. *Menepis Godaan pornografi*, Jakarta: darul falah, hal 124

¹⁰ Penjelasan Umum Tentang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

menggabungkan foto dan teks tertulis, novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi suatu pertunjukan hidup pun dapat di sebut porno.

a. Pengertian Pornografi Menurut Ahli

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut: "Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal". Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal¹¹. Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian; Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.¹²

Menurut Dadang Hawari, menyebutkan bahwa pornografi mengandung arti penggambaran tingkah laku secara *erotis* dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian merangsang. Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual.

¹¹ Persada. Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

¹² Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT Eresco, Bandung.

Menurut R. Soesilo pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari kesusilaan, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb.¹³

Menurut Armando, 2004, pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.¹⁴

b. Jenis Pornografi

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

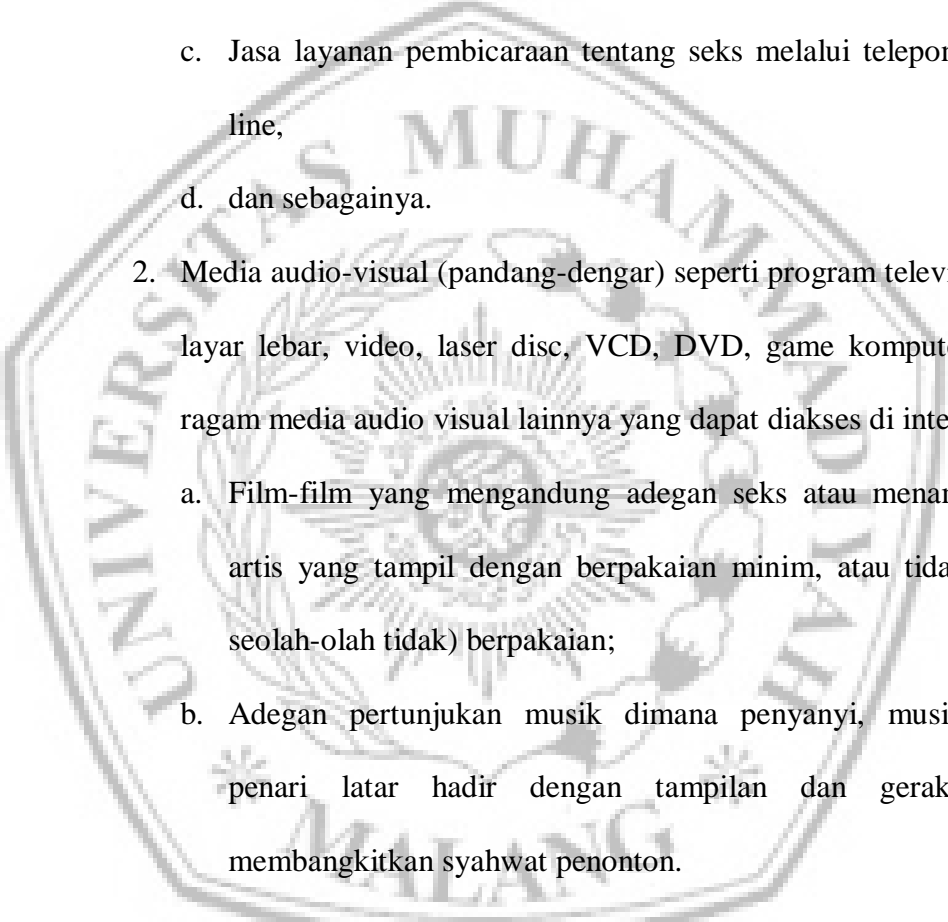
Sedangkan menurut Armando, 2004, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah :¹⁵

1. Media audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet:

¹³ R. Soesilo, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal demi Pasal, Politia, Bogor 1995 Hal. 212)

¹⁴ Armando, Ade. 2004 *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan

¹⁵ Ade Armando, *Pornografi Marak Karena Tak Ada Ketegasan Hukum*, Republika, 2005

- 
- a. Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual;
 - b. Program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum;
 - c. Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (party line,
 - d. dan sebagainya.
2. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam media audio visual lainnya yang dapat diakses di internet:
 - a. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim, atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian;
 - b. Adegan pertunjukan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.
 3. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu:

- a. Berita, cerita, atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.
- b. Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.
- c. Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.
- d. Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

c. Pornografi Apakah Bentuk Suatu Kejahatan

Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pornografi merupakan suatu bentuk dari kejahatan karena dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-533.

Menurut Pasal 282 ayat (1) yang berbunyi “ Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-.”¹⁶

¹⁶ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 Ayat (1) dan 282 Ayat (1)

Dari bunyi pasal tersebut terdapat unsur subjektif dan unsur objektif yaitu :

1. Unsur subjektif : Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1809 dijelaskan pengertian, ”Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

2. Unsur objektif : Menyiarkan, mempertontonkan (mempertunjukkan) atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya, “menyiarkan” misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran, dan lain-lain. Tulisan atau gambaran itu harus dibuat banyak “mempertontonkan (mempertunjukkan)”, diperlihatkan kepada orang banyak “menempelkan”, ditempelkan disuatu tempat sehingga kelihatan

Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;

Unsur di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, pasar, dan sebagainya;

Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar, dan sebagainya itu boleh didapat.

Contoh : mengedarkan reklame dengan surat atau surat kabar atau dengan lisan dengan terang-terangan

Unsur melanggar kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb.

Begitu juga dengan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memberikan pengertian tentang pornografi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”¹⁷ apabila dikaitkan dengan undang-undang yang telah mengatur tentang kejahatan tersebut maka pornografi dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan.

d. Pornografi Apakah Termasuk Seni

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi memang sering dipersepsikan dengan cara yang beragam. Interpretasi pornografi diberi batasan yang berbeda-beda. Orang bebas mengartikan pornografi dengan cara yang tidak sama. Ada pihak yang memandang pornografi sebagai seks (berupa tampilan gambar, aksi maupun teks), namun ada juga pihak yang memandang pornografi sebagai seni/art (berupa cara berbusana, gerakan, mimik, gaya, cara bicara, atau teks yang menyertai suatu tampilan)¹⁸.

Namun jika dilihat dari asal katanya, sesungguhnya Pornografi berasal dari kata Yunani yaitu “porne” yang berarti pelacur dan “grape” yang berarti tulisan atau gambar.¹⁹ Jadi pengertian pornografi sebenarnya lebih menunjuk pada segala karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur.

Batasan pornografi dirumuskan secara berbeda oleh Tukan yang membatasi pornografi sebagai penyajian seks secara terisolir dalam bentuk tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukkan, pementasan dan ucapan dengan maksud merangsang nafsu birahi. Dari batasan-batasan tersebut di atas tampak bahwa pengertian pornografi telah mengalami pengembangan.²⁰ Dari yang semula hanya mencakup karya tulis atau gambar, seiring dengan perkembangan teknologi media massa, ruang lingkup pornografi mengalami perluasan

¹⁸ Bungin, Burhan. *Pornomedia: Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Kencana, 2003.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

²⁰ Gunawan, Rudi dan Seno Joko S. *Wild Reality: Refleksi Kelamin dan Sejarah Pornografi*. Jakarta: Indonesia Tera dan Gagas Media, 1992.

yang mencakup jenis media lain seperti televisi, radio, film, billboard, iklan dan sebagainya. Demikian pula yang menjadi objek tidak lagi hanya pelacur -dalam pengertian orang/manusia- atau kejalangan tetapi secara perlahan pornografi mencakup semua materi yang melalui berbagai media dianggap melacurkan nilai atau seolah-olah berfungsi bak seperti pelacur. Dengan demikian maka pornografi sampai pada batasan sebagai “materi” yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.

Seni adalah sebuah ekspresi kebebasan. Kebebasan adalah milik semua orang, sesuatu yang sangat berharga yang dapat dimiliki oleh setiap insan manusia. Kebebasan adalah sesuatu yang tanpa batas yang tidak tersentuh oleh apa yang disebut belenggu apapun bentuk dan namanya.²¹ Hal mengenai kebebasan inilah juga yang seolah menjadi nafas bagi sebuah bentuk berkesenian. Pada sebagian pihak berkembang pendapat yang menyatakan bahwa memasung ekspresi dalam dunia seni adalah bentuk pembunuhan terhadap kebebasan berekspresi itu sendiri dan itu berarti pembunuhan karakter seseorang.

Pandangan demikian sepenuhnya tidak benar, kebebasan berekspresi dalam berkesenian akan menemui batasannya bilamana mulai menyentuh antara lain wilayah seksualitas atau pornografi. Dengan demikian kebebasan berekspresi dalam dunia seni tidaklah

²¹ Napsirudin dkk, Drs. 1996. *Pelajaran Pendidikan Seni. Jakarta: Yudhistira*

sebebas sebagaimana makna dari kata bebas itu sendiri. Kebebasan akan selalu berimplikasi pada masalah sosial, nilai dan moral. Dimana kebebasan itu akan berhadapan dengan nilai-nilai kehidupan sosial manusia lain. Oleh karenanya membatasi kebebasan berkesenian bukanlah berarti menghalangi hak untuk berekspresi secara umum, namun lebih pada upaya agar tidak berbenturan dengan nilai sosial dan konsep moralitas yang dianut orang lain.

e. Pengertian Truk Angkutan Barang

Truk adalah kendaraan angkutan jalan raya yang memiliki spesifikasi tertentu, kendaraan ini dipergunakan untuk mengangkut barang dalam ukuran besar dan berat. Berdasarkan jumlah sumbu dan daya angkut, kendaraan ini dibagi menjadi beberapa kategori atau jenis. Di pasaran dikenal jenis engkel, truk besar, truk 4 sumbru, trailer dan tronton. Masing-masing jenis tersebut memiliki jumlah sumbu dan daya angkut maksimal yang masing-masing berbeda, mulai dari yang paling ringan yaitu jenis engkel dan yang paling berat yaitu jenis trailer. Namun demikian, pengertian truk bisa pula kendaraan pribadi sebagai pengangkut orang yang memiliki ban besar dan tongkrongan yang tinggi di luar pengertian bus.

Baik sebagai kendaraan pengangkut maupun penarik, kendaraan jenis ini berdasarkan undang-undang harus memenuhi persyaratan dalam rancang bangun sesuai dengan sertifikat rancang bangunnya. Dengan demikian ketika menentukan karoseri untuk sebuah truk tidak

bisa sembarangan. Tentu saja hal ini diatur dengan mempertimbangkan masalah keselamatan baik pengendara, barang yang dibawa maupun sesama pengendara di jalan raya.²²

C. TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

a. Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP

Pornografi di dalam KUHP lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP – 283 KUHP. Di dalam peraturan perundang-undangan kita selalu berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab induk dalam hukum pidana di Indonesia, begitu juga dengan masalah pornografi yang sedang penulis bahas ini. Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-533, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh di langgar dan memuat sanksi-sanksinya.

Pasal 281 dan 282 adalah kejahatan, sedangkan 533 merupakan pelanggaran. Pasal 282 bermaksud melindungi norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 ingin melindungi kepentingan anak-anak muda yang belum dewasa.²³ Yang dilarang ialah “pada

²² <https://www.facebook.com/TruckManiaIndonesia/posts/873699365990592:0>. Diakses: 08/06/2018

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282, 533

tempat yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum, mempertunjukkan sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Delik yang diancam dengan pasal 282 adalah lebih serius daripada yang diancam dengan Pasal 533. Disini tidak disinggung lagi “yang melanggar kesopanan” tetapi “menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”.²⁴ Berarti bahwa tulisan atau gambar atau benda yang bersangkutan dapat membawa akibat terangsangnya nafsu birahi anak-anak muda. Tidak dipersoalkan lagi apakah tulisan atau gambar itu merupakan pelanggaran pada tata susila umum atau tidak, tetapi cukup jika ia dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda. Yang dinilai adalah akibatnya terhadap diri si anak muda dan bukan suatu perbandingan dengan moral umum.

Pasal 533 KUHP pada umumnya disebut sebagai subsider pada tuntutan jaksa disamping Pasal 282 agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 282 masih dapat dipersalahkan menurut Pasal 533 KUHP. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum²⁵.

b. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁴ Ibid., *Pengertian Pornografi dan Pornoaksi*

²⁵ Loc.cit, Tindak Pidana Pornografi, Hlm 8-9

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁶ Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.²⁷

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.²⁸

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Pornografi

²⁷ Drs. Adami Chazawi, S.H., 2009 *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara Hlm 137

²⁸ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Hal 138, Jakarta. PT. Raja Grafindo

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP (Pasal 283, 534, 535) menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan²⁹, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.³⁰

Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan.

c. Jenis Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁹ Drs. Adami Chazawi, S.H., 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Hlm 139

³⁰ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Didalam undang undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengenai jenis tindak pidana pornografi telah diatur dalam Bab II pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat”³¹:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Ayat (2) “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara eksplisit tentang kelamin.
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang diatur dalam Kitab

³¹Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-³².” Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggaman termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksusal;
- c. Mastrubasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

³² R.Seosilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 282 Ayat (1).

- e. Alat kelamin;
- f. Pornografi anak;³³

Ayat (2) “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara eksplisit tentang kelamin.
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.³⁴

Untuk memahami penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

No		Bunyi Pasal	Keterangan
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Pasal 282 Ayat (1).	Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan	Pasal 281- 282 : Menyiarkan, mempertontonkanatau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya “menyiarkan”misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat

³³ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

³⁴ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik.

		<p>kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000</p>	<p>selebaran, dan lain-lain. Tulisan atau gambaran itu harus dibuat banyak “</p> <p>Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;</p> <p>Unsur di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, dikedung bioskop, pasar, dan sebagainya;</p>
2.	<p>Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi: Pasal 4 Ayat (1) Ayat (2) Pasal 5 Ayat Pasal 6 Ayat</p>	<p>Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggaman termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan kecabulan, alat kelamin, pornografi anak. Pasal 5 : Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi</p>	<p>Pasal 4 ayat (1) dan(2) : yang dimaksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.</p> <p>Huruf a: yang dimaksud persenggaman yang menyimpang antara lain persenggaman atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.</p> <p>Huruf b: yang dimaksud dengan kekerasan seksual antara lain persenggaman yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.</p> <p>Huruf d : yang dimaksud dengan mengesankan ketelanjangan adalah suatu</p>

		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).</p> <p>Pasal 6 : Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.</p> <p>Huruf f : pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.</p> <p>Pasal 5 : yang dimaksud dengan “mengunduh”/ download mengambil file dari jaringan internet/ jaringan komunikasi lainnya.</p> <p>Pasal 6 : larangan “memiliki” atau menyimpan tidak termasuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.</p> <p>Yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.</p> <p>Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.</p>
3.	Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau	setiap orang, dan dengan sengaja, dalam artian setiap orang adalah subjek hukum bukan badan hukum, dan

	Elektronik: Pasal 27 Ayat (1)	membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	dengan sengaja merupakan unsur yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan : mendistribusikan, mentransmisikan, memnuat dapat diaksesnya. Terdapat unsur tindakan melawan hukum yaitu “tanpa hak” Objek : dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
--	-------------------------------	--	--

Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 44 Tahun 2008, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa berdasarkan tabel perbandingan diatas terdapat perbedaan unsur terkait dengan batasan-batasan atau ruang lingkup tindak pidana pornografi seperti yang tertulis dalam Pasal 281-282 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membedakan dari ketiga pasal tersebut yaitu mengenai unsur subjektif dan unsur objektif didalam Pasal 281-282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentag pornografi memiliki persamaan terkait subjek dan objeknya tetapi yang membedakan pasal tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana lebih bersifat umum dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 bersifat *lex spesialis*, sedangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang Pornografi yaitu dapat dibuktikan seseorang melakukan tindak pidana pornografi apabila seseorang tersebut memiliki dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Untuk batasan-batasan mengenai unsur tindak pidana pornografi apabila dikaitkan dengan uraian tabel perbandingan diatas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi terkait dengan tulisan atau gambar truk yang mengandung unsur tindak pidana pornografi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pornografi karena dalam Pasal 1 Ayat (1) sudah jelas menjelaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sedangkan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) terkait dengan larangan dan pembatasan mengenai gambar dan tulisan di belakang body truk yang memuat unsur pornografi telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (d) dan (2) huruf (a) Undang-Undang Pornografi karena terdapat unsur memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.